

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Terdapat berbagai penelitian mengenai reformasi perpajakan dan hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan dan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk mendukung pengajuan hipotesis dalam penelitian berikut disampaikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian Ivone Kartikaputri (2013) dengan judul: *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Survei dilakukan pada wajib pajak orang pribadi usahawan yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta. Penentuan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana.

Penelitian Stefani Gita Cakti (2010) dengan judul: *Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Sleman*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak restoran sudah sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya pajak restoran yang berlaku di Sleman dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Sleman. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi prosedur penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah dan prosedur yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak restoran telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran. Survei dilakukan pada wajib pajak restoran di Sleman. Penentuan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif.

Penelitian Anisa Nirmala Santi (2012) dengan judul: *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Wilayah KPP Pratama Semarang)*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan. Hipotesis yang diajukan kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap WP OP di Kota Semarang, yang diperoleh secara *incidental*

sampling. Metode pengumpulan data melalui kuesioner, dan selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis indeks dan analisis regresi ganda.

Penelitian Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2013) dengan judul: *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan WP OP. Sampel diambil dengan menggunakan metode *simple random sampling*, dan terdiri dari 100 pembayar pajak efektif sebagai responden. Data kemudian dianalisa menggunakan beberapa linear teknik regresi.

Penelitian Riska Wijayanti dkk (2013) dengan judul: *Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak (e-SPT)*. Penelitian ini mengenai *e-SPT* yang merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan dengan maksud agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat tercapai. Dengan kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus tercapainya administrasi perpajakan modern.

Kehadiran banyak korupsi dan kasus pajak lainnya terjerat petugas pajak telah menarik perhatian banyak pihak. Selain itu, banyak faktor lingkungan

berubah. Menanggapi situasi itu, Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola perpajakan merespon dengan meluncurkan program yang disebut pajak sistem modernisasi administrasi. Modernisasi yang berharap untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi objek yang menarik untuk penelitian karena pembayar pajak harus mengucurkan biaya kepatuhan pajak, dan biaya administrasi pajak di samping biaya-biaya lain perpajakan. Lasnafa Fasmi dkk (2013) melakukan penelitian dengan judul: *Pengaruh Modernisasi Reformasi administrasi perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak pada pengusaha kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem administrasi pajak yang dimodernisasi dari 4 dimensi, yaitu, struktur organisasi, prosedur organisasi-nasional, strategi dan organisasi budaya organisasi. Kepatuhan pajak diukur dengan kepatuhan pada pendaftaran, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran, kepatuhan dalam pelaporan and kepatuhan untuk membayar tunggakan pajak. Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Data penelitian yang digunakan diperoleh melalui kuesioner.

Penelitian Fenita (2012) dengan judul: *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System dan Analisis Perbedaan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kewajiban Perpajakan ditinjau dari Tingkat Pendidikan di Yogyakarta*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan *self*

assessment system dan menganalisis perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuisioner, sedangkan data sekunder bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak adalah dengan menggunakan skala likert, kemudian analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis persepsi wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* adalah sebagai berikut: (Erly Suandy, 2008:10)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum,” dengan penjelasan berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya yang berjudul *Pajak dan pembangunan*, Eresco, 1974, halaman 8. Definisi tersebut dapat berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*-nya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Sedangkan dalam pasal 1 Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan undang–undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Arti penting sebuah pajak adalah sebagai pemasukan terhadap kas negara. Adapun fungsi pajak sendiri adalah: (Syahrudin, 2012:8)

- a. Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi regulerend; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.

- c. Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*)
- d. Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat

2.2.2 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak agar dapat mengalir ke kas negara. (Lasnofa Fasmi dkk, 2013:16) Sistem perpajakan suatu negara mempunyai tiga unsur yaitu *Tax Policy*, *Tax Law*, dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan sangat erat hubungannya dengan pemungutan pajak. Karena sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketertiban dalam membayar pajak.

Sistem pemungutan pajak menurut Syahrudin (2012:19) yakni:

- a. *Official Assesment Sistem* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b. *Semi Self Assessment Sistem* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.

c. *Self Assessment Sistem* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Withholding Sistem yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

2.2.3 Reformasi Perpajakan

Masalah pajak sebenarnya mengikuti fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di setiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat maka sudah sepantasnya lah bahwa pajak harus mengadakan reformasi. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. (Lasnofa Fasmi dkk, 2013:1-8). Berdasarkan pengalaman yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang, terdapat begitu banyak pengertian mengenai reformasi perpajakan, dikarenakan terdapat perbedaan pengertian dan pola reformasi perpajakan yang dianut oleh negara berkembang dan yang dianut oleh negara maju. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan struktur pajak yang umumnya seragam di negara maju tetapi ada bermacam-macam struktur pajak di negara berkembang.

Syarif Mulyadi (2005:7-26) menggunakan taksonomi untuk mengklasifikasikan reformasi perpajakan berdasarkan program-program reformasi perpajakan dengan 6 (enam) atribut yang menjadi ciri-ciri dasarnya sehingga

dapat diperoleh ratusan konfigurasi yang berbeda dari reformasi perpajakan.

Keenam atribut tersebut yakni:

- a. *Breadth of reform*; reformasi perpajakan dapat berfokus pada *reform of tax structure*, atau berfokus pada *tax administration*, atau *reform of tax systems* (berfokus pada *structural* dan *administrative reform*).
- b. *Scope of reform*; reformasi perpajakan dapat dilakukan secara *comprehensive* jika meliputi hampir semua sumber penerimaan yang penting, atau dilakukan secara *partial* jika hanya meliputi satu atau dua komponen penting dari sistem perpajakan.
- c. *Revenue goals*; reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam persentase terhadap PDB (rasio pajak) yang disebut *revenue enhancing*, untuk mengganti penerimaan dengan *revenue neutral reform*, atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (*revenue-decreasing reform*).
- d. *Equity goals*; reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan disebut *redistributive* jika menegakkan keadilan secara vertikal, yaitu orang berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga, namun jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk merubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut *distributionally neutral reform*.
- e. *Resource allocations goals*; reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien disebut *economically neutral*, jika sistem perpajakan untuk

mempengaruhi aliran sumberdaya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut *interventionist reforms*.

- f. *Timing of reform*; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan perpajakan secara bersamaan disebut *contemporaneous reforms*, dengan implementasi bertahap disebut *phased reforms*, atau perubahan kebijakan perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut *successive reforms*.

Alasan dilakukannya reformasi perpajakan adalah: pertama, sebagai bagian penyesuaian struktur, reformasi perpajakan digunakan untuk mengurangi distorsi dari rangsangan ekonomi dan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya; kedua, sebagai bagian dari usaha menstabilkan ekonomi, reformasi perpajakan, bersamaan pemotongan belanja negara, untuk menghasilkan pendapatan secara rasional tanpa distorsi, adil, dan berkelanjutan. (Lasnofa Fasmi dkk, 2013:2)

Disebutkan juga oleh Riska Wijayanti dkk (2013:12) bahwa reformasi perpajakan merupakan resep untuk penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal, yang meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan aset yang berada di luar negeri. Akan tetapi perubahan kebijakan perpajakan atau reformasi perpajakan tanpa dibarengi dengan perubahan administrasi perpajakan menjadi tak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang perpajakan yang mempunyai

hubungan tak terpisahkan. Reformasi perpajakan, yang meliputi: (1) formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan (2) pelaksanaan dari peraturan, umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran. Pertama, menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisiensi dan *excess burden*. Ketiga, memperingan beban kelompok kurang mampu.

Syarif Mulyadi (2005) juga berpesan bahwa reformasi perpajakan di negara berkembang dapat berhasil apabila program reformasi menghasilkan perubahan yang mendasar dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, yang pertama yaitu struktur pajak, yang kedua yaitu mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Struktur pajak terdiri dari konfigurasi dari dasar pajak dan tarif pajak. Administrasi dan kepatuhan perpajakan terdiri dari prosedur, peraturan yang mengatur penghitungan pajak, pemungutan, pemeriksaan, sanksi, banding, dan data termasuk teknologi informasi, struktur penghargaan pelayanan masyarakat, pengungkapan yang diperlukan dan prinsip akuntansi perusahaan.

2.2.4 Reformasi Administrasi Perpajakan

Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang dikutip oleh Yeremias T. Keban yaitu bahwa: administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena

bidang kerja akademik dan teoritis. (Yeremias T. Keban, 2009:2) Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Definisi-definisi di atas menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi yang secara langsung menepis anggapan bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat laporan administratif, dan sebagainya.

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam ensiklopedi perpajakan yang disebut dengan administrasi perpajakan (*Tax Administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. (Sophar Lumbantoruan, 1997:582) Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Asri Fika Agusti dkk (2001), administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

- a. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).
- b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Penyelundup pajak (*tax evaders*)
- d. Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*).

Administrasi perpajakan akan efektif jika keempat permasalahan diatas dapat diselesaikan. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga *tax ratio* akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya

suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Mengenai reformasi administrasi, Gerald E. Caiden (1969) seperti dikutip oleh Lasnafa Fasmi dkk (2013), mengemukakan bahwa reformasi administrasi didefinisikan sebagai “*the artificial inducement of administration transformation against resistance.*” Definisi dari Caiden ini mengandung beberapa implikasi: (1) reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (*man made*) tidak bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah, (2) reformasi administrasi merupakan suatu proses, (3) resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi. (Lasnafa Fasmi dkk, 2013:6) Sedangkan menurut Riska Wijayanti dkk (2013:37), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil maka dibutuhkan struktur pajak yang disederhanakan demi kemudahan dan kepatuhan. Selain itu strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, dan komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Sasaran reformasi administrasi pajak sendiri adalah meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Elemen dasar dalam reformasi administrasi perpajakan mempunyai beberapa syarat antara lain:

- a. komitmen politik yang berkelanjutan
- b. staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang
- c. strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara
- d. pendidikan dan pelatihan pegawai
- e. tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup

Jika kelima syarat tersebut terpenuhi maka reformasi administrasi perpajakan dapat berjalan dengan baik.

Riska Wijayanti dkk (2013:8) menyatakan bahwa “reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu untuk mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik. Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.

2.2.5 Reformasi Administrasi Perpajakan Modern

Diungkapkan oleh Riska Wijayanti dkk (2013:18-23) bahwa sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat. Reformasi perpajakan

dilakukan dengan beberapa tujuan, antara lain meningkatkan kepatuhan perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan.

Menurut Riska Wijayanti dkk (2013:31), "memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak dan penegakan hukum harus menjadi tujuan utama dan secara berkesinambungan dari semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang dikemas dalam sebuah reformasi administrasi perpajakan yang modern. Selanjutnya dikenal istilah reformasi administrasi perpajakan modern yang biasa disingkat Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan konsep reformasi administrasi perpajakan modern yang merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan tersebut. Dapat dikatakan, reformasi administrasi perpajakan modern adalah reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.

Menurut Lasnafa Fasmi dkk (2013:31) ciri dari sistem perpajakan modern adalah adanya perbaikan pelayanan melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya *e-filing*, *e-payment*, *e-registration*, dan *e-counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol

yang lebih efektif. Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem bagi Wajib Pajak adalah *simplicity*, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan *Account Representative*; *certainity* yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di Kanwil serta seksi pelayanan di KPP.

Sasaran reformasi administrasi pajak modern menurut Wawan Hermansyah dkk (2011) adalah: pertama, maksimalisasi penerimaan pajak; kedua, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak; ketiga, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, keempat, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak; kelima, Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, keenam, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; ketujuh, Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan kedelapan, optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Ada beberapa dimensi dalam penerapan sistem pajak modern ini antara lain:

a. Struktur organisasi

- 1) Struktur organisasi disusun berdasarkan paradigma fungsinya
- 2) Spesifikasi tugas dan tanggung jawab yang meliputi

a) *Account Representative* (AR)

Account Representative khusus melayani dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung. AR ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jawaban atas setiap

pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak secara efektif dan profesional, terutama mengenai: Rekening Wajib Pajak (*Taxpayers' Account*) untuk semua jenis pajak, kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan (*ruling*), perubahan data identitas Wajib Pajak, tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, kemajuan proses keberatan dan banding, perubahan peraturan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

- b) Pemeriksaan pajak hanya dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa dengan alokasi tenaga fungsional pemeriksa disesuaikan dengan tingkat resiko pemeriksaan dan dilakukan pelatihan teknis yang mendukung profesionalisme tenaga pemeriksa berdasarkan kelompok usaha Wajib Pajak
 - c) Spesialisasi pegawai lainnya seperti jurusita pajak dan programmer teknologi informasi
- 3) Menyelesaikan dan menyempurnakan implementasi sistem informasi perpajakan
 - 4) Monitoring rutin melalui Rekening Wajib Pajak (*Taxpayers' Account*)
 - 5) Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan
- b. Modernisasi prosedur organisasi, meliputi
- 1) Pelayanan satu pintu melalui AR
 - 2) Penyederhanaan sistem administrasi dan meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak

- 3) Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak
- c. Modernisasi Strategi organisasi, meliputi
- 1) Kampanye sadar dan peduli pajak
 - 2) Kampanye sadar dan peduli pajak
 - 3) Intensifikasi penerimaan pajak
 - 4) Mengembangkan mekanisme *internal quality control* atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima; membangun sistem komunikasi yang efektif untuk mendapatkan *feedback*.
 - 5) Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi sehubungan dengan reorganisasi dan reformasi administrasi perpajakan modern
 - 6) *Mereview* pelaksanaan reorganisasi, pengukuran kinerja, pengukuran kepuasan Wajib Pajak, pertemuan rutin dan kunjungan rutin untuk mendapatkan *feedback*.
- d. Modernisasi budaya organisasi, meliputi
- 1) Program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).
 - 2) Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) kepada Pegawai Pajak.
 - 3) Fasilitas Perkantoran Modern.

2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lasnofa Fasmi dkk (2013:18), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Riska Wijayanti dkk (2013:9) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Besarnya jurang kepatuhan yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran yang lebih akurat atas administrasi perpajakan. Keberhasilan pengumpulan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan. Semakin patuh rakyat membayar pajak berarti jurang kepatuhan semakin sempit dan berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya, semakin lebar jurang kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan.

Kepatuhan wajib pajak telah diupayakan dengan mengubah reformasi administrasi perpajakan. Menurut Asri Fika Agusti dkk (2001), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi reformasi administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir

bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Menurut Lasnofa Fasmi dkk (2013:5), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Peningkatan kepatuhan sangat penting dalam reformasi perpajakan, dan mungkin lebih penting daripada perubahan struktural dalam sistem perpajakan.

2.2.7 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai Pelayanan Publik

Berbicara mengenai pelayanan kantor pajak, maka terlebih dahulu kita harus merujuk pada pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pendapat lain diberikan oleh Lasnofa Fasmi dkk (2013:41), ”Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan yang diselenggarakan oleh KPP dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik, dengan beberapa alasan:

- a. KPP merupakan instansi Pemerintah. KPP merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang berada di bawah Departemen Keuangan yang merupakan departemen milik Pemerintah.
- b. Pelayanan yang diselenggarakan oleh KPP adalah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat (Wajib Pajak) dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 264 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, KPP merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan pelayanan perpajakan.

2.2.8 Prosedur Penyetoran Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak menggunakan sarana penyetoran pajak yang disebut dengan SSP (Surat Setoran Pajak). Formulir SSP dapat diperoleh di KPP dan dapat diperbanyak sendiri oleh Wajib Pajak. Tempat untuk menyetorkan pajak adalah bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran (bank persepsi) dan Kantor Pos dan Giro. Batas waktu penyetoran pajak adalah sebagai berikut (<http://www.tarif.depkeu.go.id>).

Tabel 2.1
Batas Waktu Penyetoran Pajak

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran
1.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
2.	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh	
3.	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	
4.	PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak	
5.	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh	
6.	PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh	
7.	PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh	
8.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
9.	PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri	
10.	PPh Pasal 25	
11.	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang	

	dalam satu Masa Pajak	
12.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	
13.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor
14.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak
15.	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara
16.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh	tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa

	Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	Pajak berakhir
17.	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir
18.	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak

Sumber: <http://www.tarif.depkeu.go.id>.

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, titik berat pada prosedur pelayanan adalah mengenai kesederhanaan alur pelayanan. Kesederhanaan dalam konteks penyetoran pajak dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak memperoleh sarana untuk membayar pajak, yaitu SSP (Surat Setoran Pajak) dengan mudah.
- b. Formulir SSP tidak rumit (mudah diisi oleh Wajib Pajak).
- c. Tempat penyetoran pajak terjangkau oleh Wajib Pajak.
- d. Prosedur penyetoran pajak tidak memboroskan waktu, tenaga, dan uang.

- e. Wajib Pajak diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyetoran (pelunasan) pajak terutang.

2.2.9 Prosedur Pelaporan Pajak

Untuk melaporkan perhitungan dan penyetoran (pembayaran) pajak terutang, Wajib Pajak menggunakan sarana yang disebut SPT (Surat Pemberitahuan). Ada dua jenis SPT yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak, yaitu (Mardiasmo, 2006:28):

- a. SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak dalam suatu Tahun Pajak.

Prosedur pelaporan pajak menggunakan SPT adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2006:27).

- a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPT di KPP setempat dengan cara menunjukkan NPWP.
- b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan, kemudian ditandatangani. SPT yang tidak diisi dengan benar mengakibatkan pajak terutang kurang dibayar, sehingga akan dikenakan sanksi perpajakan.
- c. Bagi Wajib Pajak badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- d. Apabila SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain selain Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa khusus.

- e. SPT diserahkan kembali ke KPP bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui pos harus dilakukan secara tercatat, tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- f. Pelaporan SPT harus disertai bukti-bukti yang dilampirkan, seperti:
- 1) Laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (bagi Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan).
 - 2) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - 3) Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan (bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan).

Batas waktu penyampaian SPT ditentukan sebagai berikut:

1. SPT Masa

Tabel 2.2
Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

No	Jenis SPT Masa	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh	Pemotong PPh	20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
2.	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
3.	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	Pemungut Pajak	
4.	PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak	Pemungut Pajak	
5.	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh	Pemotong PPh	
6.	PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
7.	PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh		

8.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Wajib Pajak yang Mempunyai NPWP dan/atau PKP	
9.	PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri		
10.	PPh Pasal 25		
11.	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak		
12.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	Pemungut Pajak	
13.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	Wajib Pajak yang Mempunyai NPWP dan/atau PKP	-
14.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Pemungut Pajak	secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
15.	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	Pemungut Pajak	14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
16.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk		

17.	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
18.	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa		

Sumber: (<http://www.tarif.depkeu.go.id>)

2. SPT Tahunan

Tabel 2.3
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Jenis Pajak	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian SPT Masa
SPT Tahunan PPh	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak (biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya).
PPh Pasal 21 Tahunan	Pemotong PPh Pasal 21	Selambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Sumber: Mardiasmo (2006:29)

Dimensi prosedur pelaporan pajak dikembangkan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak memperoleh sarana untuk melaporkan pajak, yaitu SPT (Surat Pemberitahuan) dengan mudah.
- b. Formulir SPT tidak rumit (mudah diisi oleh Wajib Pajak).
- c. Prosedur pelaporan pajak tidak memboroskan waktu, tenaga, dan uang.
- d. Wajib Pajak diberikan waktu yang cukup untuk melakukan pelaporan pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Reformasi administrasi perpajakan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen moderen yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Ivone

Kartikaputri (2013), Lasnofa Fasmi dkk (2013) menunjukkan hasil bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_{a1}: Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sleman.

Pengetahuan perpajakan merupakan bentuk pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, dimana setiap wajib pajak harus memahami prosedur dan penyetoran pelaporan pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak. Pengetahuan mendorong kesadaran wajib pajak untuk patuh melakukan kewajiban perpajakannya. Selain itu, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Stefani Gita Cakti (2010) bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mendorong WP OP untuk sadar atas kewajiban perpajakan yang melekat pada WP OP sehingga menjadi wajib pajak yang patuh.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_{a2}: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sleman.